



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.5.1.1-12

**FENOMENA *DRUGS TRAFFICKING*  
DI WILAYAH PERBATASAN JAGOI BABANG INDONESIA-MALAYSIA,  
KALIMANTAN BARAT**

***THE PHENOMENON OF DRUGS TRAFFICKING IN THE BORDER REGION  
INDONESIA-MALAYSIA JAGOI BABANG, WEST KALIMANTAN***

**Nikodemus Niko<sup>1</sup>, Desca Thea Purnama<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>nikodemusn@outlook.com<sup>2</sup>purnamadesca@gmail.com

<sup>1</sup>. Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

**Abstrak**

Maraknya perdagangan obat-obatan terlarang melalui wilayah batas negara, bukan merupakan isu baru yang khusus. Persoalan ini sudah sangat lama dan seakan tanpa penyelesaian yang berpangkal ujung, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya ditemukan kasus penyelundupan obat-obatan terlarang melalui jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Studi ini dilakukan di perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan perkembangan tentang fenomena *drugs trafficking* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Data yang diolah berupa data primer melalui observasi dan data sekunder dari jurnal ilmiah, berita *daring* terpercaya dan data monografi Kecamatan Jagoi Babang. Pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, kemudian pengumpulan data sekunder berdasarkan *assesment daring* terhadap jurnal ilmiah dan berita daring, sedangkan data monografi didapatkan dari kantor kecamatan. Berdasarkan temuan dan analisis bahwa wilayah perbatasan masih sangat rawan terhadap berkembangnya penyelundupan obat-obatan terlarang. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab terjerumusnya warga perbatasan ikut andil dalam perkembangan fenomena ini. Keterbatasan keamanan PLB (Pos Lintas Batas) serta banyaknya “jalur tikus” di wilayah perbatasan Jagoi Babang ikut menjadi pemicu maraknya fenomena *drugs trafficking* di wilayah perbatasan.

**Kata Kunci :** *Drugs Trafficking, Human Security, Wilayah Perbatasan*

**Abstract**

*The rise of illegal drug trafficking through country borders is not a particularly new issue. This issue has been very long, and as if without settlement of the end, this is evidenced by the growing number of drugs smuggling cases through the Indonesian-Malaysia border. This study was conducted on the border of Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, West Kalimantan. This study uses a qualitative, descriptive approach to describe developments in the phenomenon of drug trafficking in the Indonesian-Malaysian border region of Jagoi*

*Babang, Bengkayang Regency in West Kalimantan. Data processed in the form of primary data through observation and secondary data from scientific journals, online news, and monographic data of the Jagoi Babang subdistrict. The collection of primary data through field observation, then collects secondary data based on an online assessment of scientific journals and online news, while the monographic data is obtained from the district office. Based on findings and analysis that border areas are still prone to the growth of illegal drug smuggling. Poverty has become one of the factors causing the border of the people of borders to participate in this phenomenon's development. Security limitations of PLB (cross-border post) as well as many "ratlines" in the border areas of Jagoi Babang participated in triggering the rise of this drug trafficking phenomenon in the border area.*

**Keywords :** *Border Region, Drug Trafficking, Human Security*

## PENDAHULUAN

Globalisasi tidak dapat dielakkan lagi. Bahkan saat ini kita melihat dan merasakan pengaruh dari globalisasi dalam kehidupan kita, keberadaan globalisasi juga memunculkan beberapa permasalahan sosial. Suyatno (2010) menyebutkan bahwa satu diantara “pekerjaan rumah” kita saat ini adalah membangun kerjasama yang simbiotik mutualisme antar pemerintah pusat kedua negara dengan *local governance* di masing-masing negara sebagai jalan terbaik untuk meringankan beban negara menyelesaikan masalah yang dihasilkan globalisasi, khususnya di daerah perbatasan.

Satu diantara isu global yang semakin berkembang dan menjadi perhatian seksi pada masyarakat internasional masa kini yaitu perdagangan Narkoba (*Drug Trafficking*). *Drug trafficking* merupakan salah satu sindikat organisasi kriminal internasional (*European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction*, 2017). Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Isu perdagangan internasional memang tidak akan ada habisnya dibicarakan, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat negara. Seperti halnya *human trafficking* yang selalu menjadi *hot issue* di negara berkembang, termasuk Indonesia. Jenis perdagangan narkoba ini termasuk kejahatan berbahaya karena sasarannya adalah pemuda dan anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa.

Indonesia merupakan salah satu jalur utama penyelundupan narkoba di Asia Tenggara dimana wilayah perbatasan negara menjadi jalur yang strategis, hal ini menjadi pekerjaan yang serius bagi Indonesia untuk menemukan metode baru dalam pemberantasan kejahatan perdagangan narkoba (Gafar, 2012; Herindrasti, 2018). Menurut perkiraan otoritas Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini terdapat sekitar 5,6 juta orang pengguna narkoba di Indonesia (Latschan, 2016).

Peredaran Narkoba yang masuk ke wilayah ini berasal dari jaringan di seluruh dunia, terutama berasal dari Amerika Serikat. Jenis narkoba yang masuk pun bervariasi seperti jenis Heroin yang rata-rata berasal dari perkebunan opium yang banyak berasal dari Afganistan dan Myanmar (*United States Sentencing Commission*, 2019). Kemudian, obat-obatan terlarang tersebut diselundupkan melalui Malaysia dan masuk dari wilayah perbatasan ke Indonesia. Jaringan perdagangan yang sudah berskala internasional ini sangat sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam kasus penjarangan narkoba, adanya bentuk kerjasama dan pengawasan yang ketat yang dibangun untuk memperketat dan meminimalisir permasalahan ini.

Perdagangan narkoba adalah kejahatan yang tidak dapat ditolerir di negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan luar biasa perdagangan narkoba, dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati. Kasus di Indonesia, penggunaan jenis narkotika digunakan sebagai obat medis sudah ada sejak zaman kolonial belanda seiring dengan adanya penanaman opium di Jawa Timur, serta opium yang dibeli dari India oleh pemerintah kolonial Belanda (Winarno, 2014).

Narkoba kemudian disalahgunakan terutama dikalangan anak-anak muda. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada level parah, sehingga menjadi bisnis yang menggiurkan bagi bandar/*gembong* perdagangan narkoba. Perdagangan ilegal ini strategis dilakukan melalui jalur perbatasan negara Indonesia-Malaysia (Sasongko, 2020; Nugraheny, 2020). Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak muda ini sangat memprihatinkan karena besar dampak yang kemudian ditimbulkan, mulai dari kesehatan, ekonomi maupun sosial. Bahkan kematian mengancam ketika terjadi penyalahgunaan narkoba. Data dari BNN (2019) menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 103,2 ton ganja dimusnahkan oleh pihak BNN sepanjang tahun 2019.

Permasalahan narkoba juga menghampiri Kalimantan Barat yang merupakan jalur perbatasan darat secara langsung dengan negara Malaysia. Kedekatan jarak wilayah dengan negara tetangga ini membuat Kalimantan Barat memiliki potensi besar terhadap penyelundupan narkoba. Pada berita di Pontianak Pos (2019) Kapolda Kalimantan Barat mengatakan di wilayah Kalimantan Barat terdapat 23 jalan tidak resmi (jalan tikus) yang berada di sepanjang perbatasan Indonesia–Malaysia. Berdasarkan pemetaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat terdapat 29 titik

rawan peredaran narkoba di perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Bengkayang dan titik rawan yang paling dominan ada di kawasan perbatasan Jagoi Babang, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia (Putri, 2018; Abdi, 2020).

Kemudian, wilayah geografis antara Kalimantan Barat dengan Malaysia yang sangat dekat dari jalur darat, menjadi salah satu faktor pendukung penyebaran narkoba di wilayah perbatasan, sehingga jalur ini menjadi tempat keluar masuk perdagangan obat-obatan terlarang yang ilegal (Cipta, 2019). Adanya akses yang mudah untuk menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia membuat wilayah perbatasan di Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang tidak aman dan sasaran dalam penyebaran narkoba dari peredaran kejahatan transnasional ini (Gafar, 2012; Gabriela, 2019; Niko, 2019). Berdasarkan uraian pada latar belakang, studi ini mendeskripsikan fenomena *drugs trafficking* dan sebab-sebab terjadinya di wilayah perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif eksploratif, yang mana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Creswell (2010) menyebutkan data penelitian kualitatif dapat berupa lisan dan tulisan.

Data primer didapatkan melalui observasi lapangan sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah, berita pada media daring, jurnal ilmiah dan buku yang terkait dengan tema penelitian, serta melalui dokumen pemerintahan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang. Kemudian, data primer merupakan hasil eksplorasi melalui pengamatan dan interpretasi penulis. Analisa data lapangan dilakukan pada saat yang bersamaan dengan penulisan artikel ini, sehingga verifikasi data lapangan juga dilakukan pada saat yang bersamaan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perdagangan Ilegal di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia**

Sejak periode pertama presiden Jokowi, wilayah perbatasan mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur yang sudah baik. Namun, pembangunan infrastruktur saja tidak menjamin wilayah perbatasan menjadi kawasan terdepan negara. Berdasarkan

pengamatan penulis, perbatasan Jagoi Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat, keadaannya masih ditandai dengan adanya keterisolasian wilayah desa, keterbatasan sarana dan prasarana seperti belum ada listrik, serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih banyaknya angka kemiskinan. Keterbelakangan yang terjadi di wilayah perbatasan disebabkan paradigma yang selalu menganggap perbatasan adalah halaman belakang bukan sebagai teras depan sebuah negara, selain itu akses yang jauh membuat perbatasan semakin jauh dari peradaban pembangunan.

Fathiyah (2010) menyebutkan bahwa pada persoalan perbatasan negara, Indonesia dan Malaysia memiliki tantangan keamanan yang sama, selain perdagangan manusia juga kasus-kasus perompakan dan terorisme. Penulis menambahkan yaitu *drug trafficking*, *challenge* ini yang cukup memberikan dampak pada *human security*, baik pada masyarakat Indonesia maupun di Malaysia. Kasus-kasus sosial maupun ekonomi yang terjadi, jika tidak dilakukan berbagai upaya maka akan memperburuk keadaan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

Wilayah perbatasan Jagoi Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat merupakan kawasan wilayah yang rawan akan penyelundupan barang-barang ilegal, seperti gula, baju bekas, makanan dan susu. Dalam observasi yang dilakukan, penulis menemukan banyaknya gudang-gudang tempat penyimpanan gula, minyak goreng dan barang lainnya yang berasal dari Malaysia. Barang-barang tersebut ada yang diangkut dari Malaysia tanpa perizinan yang jelas, sehingga harga jualnya terjangkau (murah).

Sebagai contoh, dalam berita Suara Pamred (2019) barang-barang yang pernah disita oleh aparat sebagai barang bukti berupa 1.024.193 bungkus kosmetik dan obat-obatan, 4.350 bungkus bahan pangan, 774.036 suku cadang kendaraan, dan 48.641 barang elektronik. Barang-barang selundupan itu diangkut dengan truk besar yang turut disita polisi. Nilai barang bukti yang disita polisi mencapai Rp.67 miliar. Sindikat ini membawa barang asal China ke Malaysia melalui Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, kemudian dikirim ke Pelabuhan Kuching, Serawak. Dari sana, barang diangkut dengan truk kecil melalui jalan tikus ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Banyaknya obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar (Latschan, 2016). Indonesia sendiri sudah membuat banyak kemajuan dalam beberapa

tahun terakhir dan menyita narkotika dan obat bius ilegal dalam jumlah besar yang masuk dari luar negeri. Terutama bahan-bahan methamphetamine, yang di Indonesia dikenal dengan sebutan sabu-sabu.

Organisasi sindikat obat bius ini sangat rapi dan beroperasi di beberapa negara. Mereka memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang dapat beroperasi melewati laut tanpa pengawasan. Kemudian, dengan truk pengangkut barang jika melalui jalur perbatasan darat. Methamphetamine akhir-akhir ini diproduksi langsung dalam jumlah besar di Indonesia, tapi banyak juga yang didatangkan lewat Cina, Filipina dan Iran (Latschan, 2016).

## **2. Penyebab Terjadinya Drugs Trafficking di Perbatasan Jagoi Babang**

### **a. Kemiskinan**

Permasalahan pokok pada masyarakat perbatasan adalah kemiskinan. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada, sehingga masyarakat tidak berdaya dan menjadi posisi yang paling mudah untuk dipengaruhi. Berdasarkan data monografi Kecamatan Jagoi Babang (2016) tercatat sebanyak 1.537 KK (Kepala Keluarga) hidup di garis kemiskinan dari jumlah total 1.679 KK di Kecamatan Jagoi Babang. Kemiskinan menjadi penyebab paling strategis terjadinya perdagangan ilegal di perbatasan Jagoi, seperti perdagangan gula, obat-obatan terlarang bahkan perdagangan manusia (Niko, 2016; Niko, 2017).

Sementara itu sumber penghidupan masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Jagoi Babang hampir 90% nya berasal dari mata pencaharian sebagai petani padi. Selain bertani padi mereka juga membudidayakan lada, coklat, dan karet sebagai sumber pendapatan tambahan. Di samping sumber daya pertanian, masyarakat di wilayah perbatasan juga ada yang melakukan pertambangan emas secara tradisional. Dilihat dari sumber perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan ini, mereka masih lemah dan berpenghasilan pas-pasan. Sehingga membuka lebar kesempatan bagi para bandar untuk menggunakan jasa kurir para anak muda di perbatasan yang notabene kehidupannya masih berada digaris kemiskinan.

Penyebab utama mudahnya warga perbatasan terjerumus dalam sindikat perdagangan obat-obatan terlarang adalah kemiskinan berantai yang turun temurun mengungkung masyarakat lemah. Dikatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan

berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi (Suyanto, 2013). Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di wilayah perbatasan sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian yang mereka capai. Adanya indikator ini menimbulkan suatu kesenjangan ekonomi yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia. Terlihat bahwa masyarakat yang mendiami perbatasan di wilayah Malaysia lebih mapan secara ekonomi dibandingkan masyarakat perbatasan yang berada di wilayah Indonesia.

Sebagai sebuah permasalahan sosial, kemiskinan tentu membawa dampak yang lebih luas terlebih bagi anak-anak di perbatasan. Mereka adalah sasaran empuk bagi para predator sindikat perdagangan obat-obatan terlarang ini, selain mereka menjadi sasaran untuk menjadi pengguna mereka juga jadi sasaran untuk menjadi kurir atau pengedar. Hal ini senada dengan pendapat Thoumi (2014) yang menyebutkan bahwa faktor domestik penyebab berkembangnya kejahatan organisasi dan sindikat perdagangan obat-obatan terlarang adalah kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan dengan kekayaan, krisis ekonomi, korupsi dan persoalan serupa.

Fenomena kemiskinan juga tergambar dalam keseharian anak-anak di perbatasan negeri. Sebagaimana ditulis dalam website KBAI (Kantor Berita Anak Indonesia), menyebutkan bahwa anak-anak bekerja sambilan dari siang hingga sore hari (setelah pulang sekolah—bagi mereka yang sekolah pagi). Ada pula yang bekerja dari pagi hingga siang hari (sebelum berangkat sekolah—bagi mereka yang sekolah siang). Jenis pekerjaannya pun bervariasi, ada yang menjadi buruh di sebuah pabrik ekonomi kreatif masyarakat, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh penoreh karet atau masyarakat disana menyebutnya '*mutong*'. Mereka mencari uang untuk jajan sekolah atau membayar uang sekolah, dan ada pula yang untuk menambah penghasilan orang tuanya, dalam artian membantu perekonomian keluarganya.

Kemudian, kondisi miskin yang terjadi pada masyarakat lokal ini membuat banyak anak-anak perempuan yang putus sekolah. Mereka kemudian memilih untuk menjadi TKW di negara Malaysia, bukan melalui jalur resmi melainkan menjadi TKI ilegal yang masuk wilayah Malaysia tanpa dokumen lengkap. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka terlibat dalam jaringan perdagangan obat-obatan terlarang yang ilegal, karena mereka tidak memiliki *soft skill* untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik.

### **b. Longgarnya Pemeriksaan di Pos Lintas Batas (PLB)**

Masuknya barang-barang ilegal itu terjadi akibat kemudahan akses dan pengawasan yang kurang oleh kedua negara. Satu diantaranya adalah kawasan perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Kawasan perbatasan ini tidak memiliki *gate border* resmi dan hanya PLB (Pos Lintas Batas) sehingga sangat mudah barang-barang ilegal masuk ke wilayah Indonesia. Belum lagi di kawasan ini memiliki banyak sekali titik ‘jalan tikus’ sebagai jalur alternatif untuk penyelundupan barang-barang ilegal, bahkan para pelaku perdagangan ilegal melalui jalur perkebunan sawit yang ada di wilayah batas dan dengan modus lainnya.

Longgarnya pemeriksaan di gerbang perbatasan atau PLB (Pos Lintas Batas) di perbatasan Jagoi Babang sangat membuka kesempatan yang lebar bagi sindikat perdagangan obat-obatan terlarang ini melancarkan aksi penyelundupan dari negari Jiran ke Indonesia. Wilayah perbatasan Jagoi Babang sangat rentan terhadap praktik infiltrasi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya “jalur tikus” yang digunakan untuk menyelundupkan barang dan tenaga kerja ilegal. Sekurang-kurangnya sekitar delapan titik “jalur tikus” yang merupakan jalur penghubung antara Malaysia dan Indonesia yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Jalur ini tidak ada petugasnya (Tentara atau ABRI) sehingga jika ke Malaysia melalui jalur ini tanpa ada pemeriksaan dokumen. Keamanan wilayah yang masih longgar ini menjadi “PR” besar bagi negara. Karena, jika hal ini terus dibiarkan akan semakin banyak masalah yang timbul akibatnya.

Penyelundupan obat-obatan terlarang itu pun menggunakan berbagai macam cara agar berhasil lolos dari pemeriksaan petugas. Seperti yang diberitakan di Pontianak Pos (2019) dan Suara Pemred (2019) yang menyebutkan penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat melalui jalur perbatasan. Perbatasan di beberapa wilayah di Kalimantan Barat belum memiliki *gate border* resmi seperti di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas. Belum adanya PLB resmi ini merupakan indikasi penyebab maraknya penyelundupan obat-obatan terlarang ini melalui wilayah perbatasan negara.

### **c. Penguatan Stakeholder dalam Upaya Pemberantasan *Drug Trafficking* di Wilayah Perbatasan**

Pemerintah dan aparat keamanan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan, bantuan dan kerjasama yang baik dengan komunitas lokal dan NGO yang



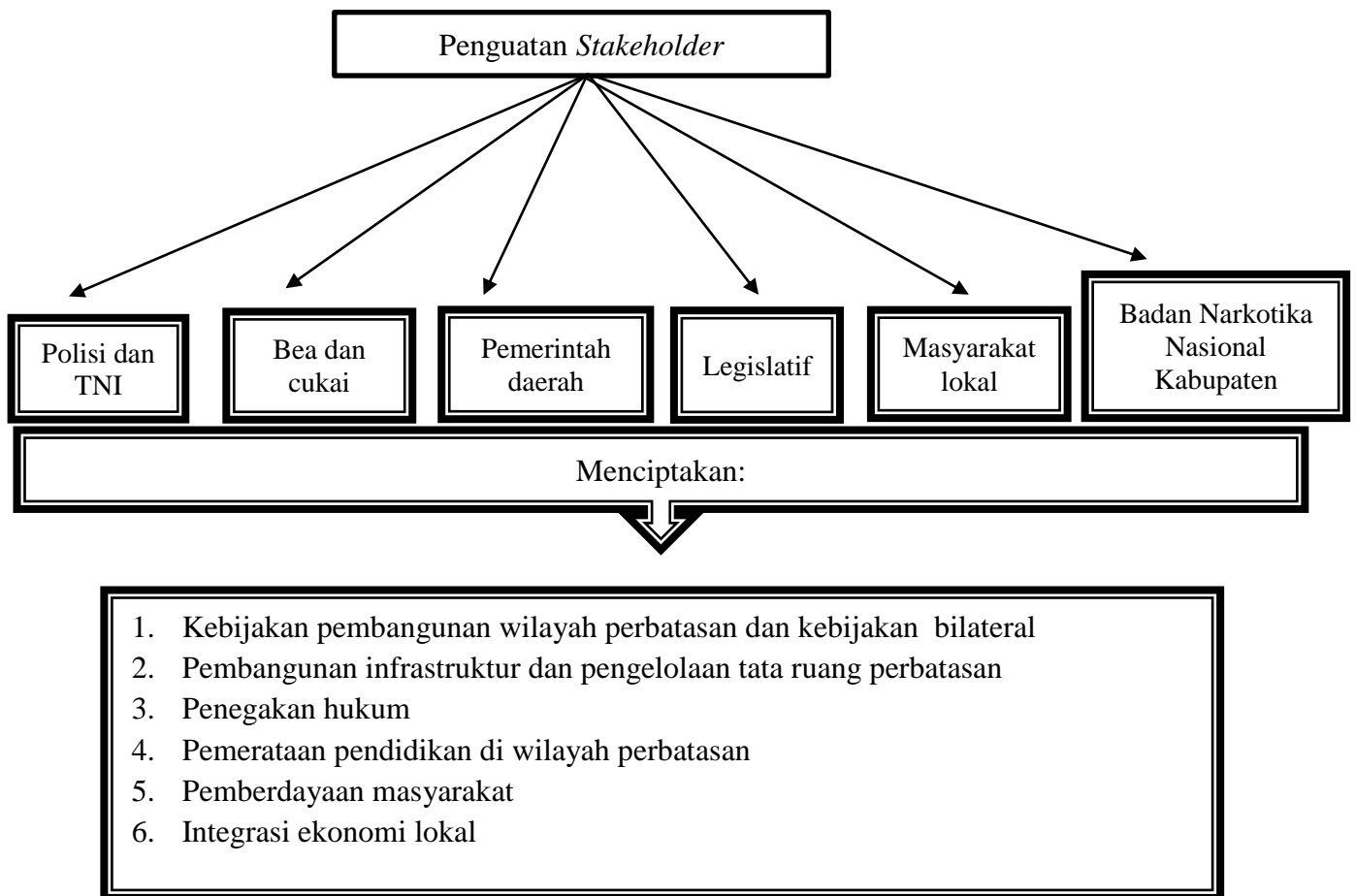
berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Kerjasama antar *stakeholder* ini dapat berupa terbitnya peraturan tentang perlindungan masyarakat lokal, pemberdayaan maupun pembangunan manusia di komunitas lokal. Hal yang cukup krusial adalah pembanguana infrastruktur yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai sentra ekonomi lokal.

Keberadaan tentara dan petugas pemerintahan terkait, sangat diperlukan guna untuk meminimalisir maraknya fenomena *drugs trafficking* ini, mengingat tidak adanya pos khusus petugas BNN di wilayah perbatasan. Pihak kepolisian juga turut ambil bagian dalam menuntaskan perdagangan ilegal lintas negara ini, karena ini menyangkut keamanan setiap orang yang ada di wilayah perbatasan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). *Human security* masyarakat yang hidup di perbatasan harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adanya kemudahan akses masyarakat ke wilayah Malaysia, bisa menjadi pintu masuk berbagai bentuk perdagangan ilegal.

Pada kenyataannya, pemerintah dan pihak berwajib hanya akan bertindak setelah terdapat atau terindikasi adanya kasus saja. Namun sebelum ada kasus, tidak ada tindakan pencegahan yang bermakna bagi keamanan warga di kawasan perbatasan. Selain itu, pemerintah juga semestinya segera membangun *gate border* resmi di wilayah perbatasan Jago Babang, agar kasus-kasus penyelundupan barang-barang ilegal dapat terdeteksi secara dini dan tidak merugikan negara.

Lalu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus segera menjadikan perbatasan negara sebagai wilayah prioritas dalam pembangunan (infrastruktur maupun pembangunan manusia). Pembangunan yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga bentuk non fisik yang akan berdampak baik untuk negara dan masyarakatnya, sehingga dengan adanya pembangunan di wilayah perbatasan masyarakat tidak lagi menjadi masyarakat yang terisolasi dan tertinggal. Pembangunan ini perlu pengawasan serius, karena menyangkut keterjaminan masyarakat lokal benar-benar berdaya. Oleh karena itu, perlu penguatan di setiap elemen pemangku kepentingan wilayah, sebagai gambaran berikut ini :

Gambar 1. Penguatan *Stakeholder* dalam Memerangi *Drugs Trafficking* di Perbatasan



Sumber : Olah Data Penulis, 2019

## KESIMPULAN

Wilayah perbatasan negara sangat rawan akan praktik penyelundupan barang-barang ilegal, termasuk didalamnya adalah perdagangan ilegal obat-obatan terlarang. Berdasarkan analisis ditemukan sebab-sebab praktik *drugs trafficking* ini berkembang yaitu: 1). Kemiskinan masyarakat perbatasan yang masih tinggi, dapat dilihat dari sumber penghidupan yang masih bergantung pada hasil alam. Hasil tani dan kebun masyarakat didagangkan di Serikin, Malaysia, 2). Kendornya penjagaan dan pemeriksaan atas barang dan jasa serta lalu lalang manusia yang keluar masuk dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya. Situasi ini menimbulkan potensi-potensi besar akan maraknya *drugs trafficking* di wilayah perbatasan. Terlebih lagi, di wilayah perbatasan Jagoi Babang belum terdapat PLB (Pos Lintas Batas) resmi untuk pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P. 2020. *BNN Ingin Pengawasan Peredaran Narkoba di Perbatasan Ditingkatkan*. Retrieved from: <https://tirto.id/bnn-ingin-pengawasan-peredaran-narkoba-di-perbatasan-ditingkatkan-etQ6>
- Anonim. 2016. *Data Monografi Kecamatan Jagoi Babang Tahun 2016*. (tidak dipublikasikan).
- Badan Narkotika Nasional (BNN). 2019. *Press Release Akhir Tahun 2019*. Retrieved from: <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>
- Cipta, H. 2019. *Aparat TNI Perbatasan Amankan Sabu Selundupan dari Malaysia Seberat 51,9Kg*. Retrieved from: <https://pontianak.kompas.com/read/2019/12/12/09224701/aparat-tni-perbatasan-amankan-sabu-selundupan-dari-malaysia-seberat-519-kg>
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction. (2017). *Drug Trafficking Penalties Across the European Union*. Technical Report: EMCDDA.
- Fathiyah, A. bt. A. R. 2010. *The Border of Malaysia-Indonesia and Straits of Malacca Problem*. dalam Madu, et.al. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gabriela, S. 2019. Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*. 3(2) :147-172. Doi: 10.24198/intermestic.v3n2.4
- Gafar, Y. 2012. Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional). *Jurnal Nestor Magister Hukum*. 2(2):1-20.
- Herindrasti, V. L. S. 2018. Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*. 7(1):19-33. Doi: <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Latschan, T. 2016. *PBB: Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkoba*. Retrieved from: <http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054>
- Niko, N. 2016. *Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAQ tahun 2016 di Universitas Bakrie, Jakarta.

- Niko, N. 2017. Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*.4(1):32-45.
- Niko, N. *Potret Kehidupan Anak di Batas Negeri*. Retrieved from:<http://kantorberitaanakindonesia.com/potret-kehidupan-anak-di-batas-negeri.html>
- Niko, N., & Samkamaria. 2019. Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Religion and Society*. 1(2):104-114.
- Nugraheny, D. E. 2020. *BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba*. Retrieved from:<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/14082681/bnn-ungkap-daerah-perbatasan-rawan-penyelundupan-narkoba>
- Pontianak Post. 2019. *Sita Dua Miliar, Mobil Mewah dan Motor Sport dari Tersangka Narkoba*. Retrieved from:<https://pontianakpost.co.id/polda-sita-uang-miliaran-dan-mobil/>
- Putri, A. W. 2018. *Susahnya Menangkap Bandar Narkoba di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia*. Retrieved from: <https://tirto.id/susahnya-menangkap-bandar-narkoba-di-wilayah-perbatasan-ri-malaysia-cPY2>
- Sasongko, D. 2020. *Kasus Peredaran Narkoba di Perbatasan RI-Malaysia Kembali Dibongkar*. Retrieved from: <https://nasional.sindonews.com/read/1540150/14/kasus-peredaran-narkoba-di-perbatasan-ri-malaysia-kembali-dibongkar-1582820955>
- Suara Pamred. 2019. *Penyelundup Jebol Perbatasan*. Retrieved from: <https://www.suarapemredkalbar.com/berita/bengkayang/2019/08/22/penyelundup-jebol-perbatasan>
- Suyanto, B. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Suyatno. 2010. Globalisasi Perbatasan Indonesia dan Local Governance. Dalam Madu, et.al. (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thoumi, F. E. 2014. *The Relationship Between Illegal Drugs and Violence: Is There Cause and Effect?* LLILAS Portal.
- United States Sentencing Commission 2006-2016 Datafiles. (2019). *Quick Facts: Drugs Trafficking Offenses*. Retrieved from:[www.ussc.gov/research/quick-facts](http://www.ussc.gov/research/quick-facts)
- Winarno, B. 2013. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).